

RESTRUKTURISASI DAN REORIENTASI MENUJU PERCEPATAN TARGET E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Slamet¹, Abdul Razak bin Hamdan²; Aziz Deraman³

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

^{2&3}Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi Selangor

¹slametphd@gmail.com, ²arh@ftsm.ukm.my, ³ad@ftsm.ukm.my

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan yang baru. Penyelenggaraan sistem operasional pemerintah yang memanfaatkan TI dikenal dengan *e-government*. Kehadiran *e-government* dapat merubah pola fikir dan memberikan manfaat kepada semua masyarakat suatu negara. Perubahan ini dapat tercapai, manakala target utama inisiatif *e-government* yaitu ide *one-stop-services* terwujud. Namun demikian, untuk mewujudkan ide tersebut, nampaknya mengalami kelambanan dan hambatan. Maka untuk mempercepat target *e-government* perlu ada restrukturisasi kelembagaan KPDE sebagai lembaga teknis menjadi lembaga strategis dengan nama CIO (*chief information officers*). Dan reorientasi model pentahapan *e-government* dengan pendekatan konsep perencanaan strategik teknologi informasi. Pendekatan ini merupakan langkah terpenting bagi pemerintah daerah yang akan membangun *e-government* karena mampu memahami sosio organisasi dan masyarakat serta mampu mengidentifikasi TI yang diperlukan.

Kata kunci : target, restrukturisasi, reorientasi *e-government* dan perencanaan strategik teknologi informasi.

1. Pengantar

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan internet telah menjadi alat kekuatan untuk memikirkan kembali sistem pemerintahan dengan model yang baru. TI dan internet mendorong transformasi dari paradigma birokrasi tradisional (yang menekankan kepada standarisasi, rutinitas, spesialisasi, fokus internal dan kewenangan), menuju paradigma *e-government* (yang menekankan kepada membangun jaringan yang terkordinasi, kerjasama eksternal dan orientasi pelayanan kepada *customer/masyarakat* sebagai fokusnya) [1]. Sehingga TI menjadi salah satu elemen utama dalam mem-perbaiki sistem managerial pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang berbasis TI dan internet (*e-government*) banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan masyarakat secara luas. Sehingga semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Beberapa negara maju dan tetangga telah memanfaatkan *e-government*. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nation tahun 2005 tentang kesiapan *e-government*, ada 10 negara yang dinyatakan mendapatkan indeks tertinggi, yaitu : United States, Denmark, Sweden, United Kingdom, Republic of Korea, Australia, Singapore, Canada, Finland dan Norway [13].

Di Indonesia, inisiatif *e-government* dimulai sejak tahun 2001, dengan dikeluarkannya Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 dan dipertegas kembali dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 [6].

Namun demikian, hingga kini dibeberapa daerah pelaksanaan *e-government* belum banyak dinikmati oleh masyarakat secara luas, ada kesan lamban dan muncul adanya masalah.

2. Konsep dan Manfaat *e-Government*

2.1 Konsep *e-Government*.

Pelbagai konsep *e-government* telah banyak disampaikan, diantaranya adalah World Bank memberikan definisi *e-government refers to the use of information and communications technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government* [15]. Berryman mendefinisikan *e-government* dihubungkan dengan proses pelayanan yang bersifat *on-line*, *e-service*, *e-administrasi* dan *e* yang lain [2]. Hal di atas dimaksud untuk memberikan kemudahan komunikasi dan transaksi antara pemerintah dengan warga negara-nya (G₂C), pemerintah dengan organisasi bisnis (G₂B) dan antar lembaga pemerintah (G₂G) serta pemerintah dengan stafnya G₂E [8].

Apabila ketiga konsep ini disimpulkan, maka *e-government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas,

transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya.

2.2 Manfaat *e-Government*.

Isu-isu kuat terhadap implementasi *e-government* adalah mewujudkan *good governance*, menekan korupsi, mekanisme lebih transparan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi [5; 12; 15], dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan.

Ketika *e-government* dapat diimplementasikan dengan sempurna, tentunya akan memberikan pelbagai manfaat dan perubahan, seperti :

- Terjadi pergeseran dari paradigma birokrasi ke paradigma *e-government* [1], sebagai mana tabel 1, berikut :

Tabel 1 : Pergeseran paradigma dalam penyampaian pelayanan publik.

	Paradigma Birokratis	Paradigma <i>e-government</i>
Orientasi	Efisiensi biaya produksi	Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (<i>customer</i>).
Proses organisasi	Merasionalisasi peran, pembagian tugas dan pengawasan hierarki vertikal	Hirarki horizontal, jaringan organisasi dan tukar informasi
Prinsip manajemen	Manajemen berdasarkan peraturan dan mandat (perintah)	Manajemen bersifat fleksibel, teamwork antar departemen dengan koordinasi pusat.
Gaya kepemimpinan	Memerintah dan mengawasi	Facilitator, koordinatif dan <i>entrepreneurship</i> inovatif.
Komunikasi internal	Hirarki (berperingkat) dan <i>top-down</i>	Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi pusat dan komunikasi langsung.
Komunikasi eksternal	Terpusat, formal dan saluran terbatas	Formal dan informal, umpan balik langsung, cepat dan banyak saluran
Cara penyampaian pelayanan	Dokumen dan interaksi antar personal	Pertukaran elektronik dan interaksi <i>non face-to-face</i> .
Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan	Terstandartkan, keadilan dan sikap adil	Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.

Sumber : Alfred (2002)

- Membuat mudah bagi setiap warga negara memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya, memperbaiki efisiensi dan efektivitas dan memperbaiki tanggapan/tanggungjawab sistem pemerintahan kepada warga negaranya. Selanjutnya akan memberikan *value*, seperti: penyederhanaan pelayanan, menghilangkan lapisan-lapisan pelayanan, memungkinkan semua warga negara memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi sistem pemerintahan dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat [10].
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan; dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas [7].
- Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses informasi, pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat

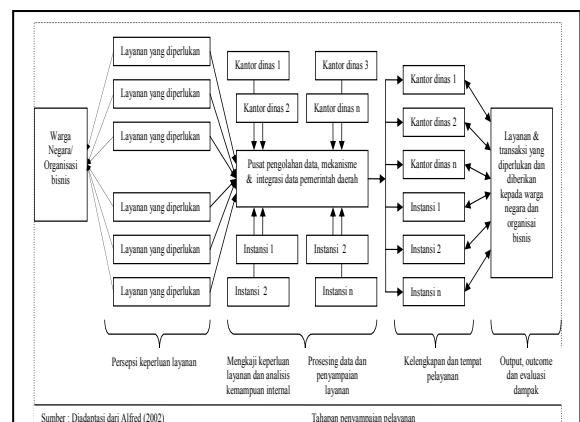
berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak [5; 12].

3. Target *e-Government*.

Target utama *e-government* adalah terciptanya *one-stop-services*. TI dan internet merupakan alat untuk mendukung terciptanya ide tersebut. *One-stop-services* merupakan payung organisasi yang menjalankan di atas fungsi-fungsi departemen/ instansi yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kenyamanan dan kepuasan pengguna melalui integrasi pelayanan (Alfred 2002). Sehingga secara alami, *good-governance* dan manfaat daripada *e-government* dapat tercapai.

Kasus di Malaysia, konsep *one-stop-services* sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat. *Identity Card* (IC) yang dimiliki oleh masyarakat dapat digunakan untuk transaksi kepada semua agensi-agensi kerajaan di seluruh negara. Sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat, mudah, murah, transparan dan terkontrol.

Dalam konteks Indonesia *one-stop-services* bukan berarti akan menghilangkan atau meringkas instansi tertentu, tetapi mengintegrasikan sistem antara instansi dan kantor dinas – asumsikan *e-government* untuk pemerintah daerah. Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) sebenarnya mempunyai peran strategis yaitu melakukan koordinasi dengan kantor dinas dan instansi di lingkungan pemerintah daerah. Seperti kantor dinas-kantor dinas, kepolisian, imigrasi, perpajakan, pertanahan, kecamatan, PLN, PDAM dan sektor swasta lain yang terkait. Tujuan daripada koordinasi ini adalah untuk menyergamkan standart data masyarakat, sehingga semua instansi adalah satu dan sama untuk keperluan yang berbeda-beda. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat data pribadinya dan tanggungjawab apa saja sebagai warga Negara, yang dapat dilihat dimana dan kapan saja secara jelas melalui internet. Dilain fihak pemerintah juga dapat mengontrol masyarakat dengan mudah. Sebagai ilustrasi sebagaimana gambar 1.



Sumber : Diadaptasi dari Alfred (2002)

Tahapan penyampaian pelayanan

Gambar 1: Ilustrasi *one-stop-services* pemerintah daerah.

Selama ini banyak pemerintah daerah telah membuat *web site* yang menampilkan pelbagai informasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat ketika akan melakukan pengurusan pada bidang-bidang tertentu. Misalnya akan mengurus surat ijin tempat usaha, disana sudah jelas secara administratif ditampilkan dalam *web sitenya*. Namun yang perlu difahami dan disadari oleh semua pengelola *e-government*, bahwa penampilan informasi melalui *web site* masih belum *e-government* yang sesungguhnya, tetapi boleh dikatakan awal *e-government*.

Untuk mewujudkan target *e-government* nampaknya mengalami kelambaan dan hambatan. Oleh sebab itu, perlu ada pendekatan lain guna mempercepat terwujudnya target tersebut. Maksud dari paper ini adalah mengusulkan langkah percepatan dimaksud, yang dapat digunakan sebagai bahan perbincangan bagi fihak pengelola dan fihak yang punya kepedulian tentang kondisi *e-government* di Indonesia.

4. Restrukturisasi dan Orientasi *e-Government*

Berdasarkan pengamatan, ada hal yang perlu diidentifikasi guna mempercepat *e-government* di Indonesia, yaitu : pertama, restrukturisasi kelembagaan kantor pengelola data elektronik (KPDE); dan kedua, merubah pandangan kembali (*re-orientasi*) model pentahapan *e-government* yang digunakan sebagai pendekatan selama ini.

4.1 Restrukturisasi kelembagaan KPDE

Merujuk pada peraturan pemerintah daerah kota X, bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi *badan* dan *kantor* sebagai lembaga teknis pemerintah daerah X. KPDE merupakan salah satu bagian dari peraturan ini. Sebagai lembaga teknis tentunya ada keterbatasan, seperti : (i) menjalankan tugas yang bersifat teknis, kecuali mempunyai jiwa *entrepreneurship*; (ii) menjalankan tugas sesuai kebijakan dari atasan; (iii) menjalankan tugas sesuai prosedur; dan lain sebagainya. Sehingga kekuatan inisiatif *e-government* sangat tergantung pada *top-leader*, sementara kepala pemerintah daerah setiap lima tahun berubah dan bersifat politis.

Melihat peran dan fungsinya yang strategis dalam mempercepat terwujudnya *e-government* serta perkembangan ICT yang memerlukan manajemen tersendiri. Maka perlu dipertimbangkan posisi KPDE menjadi CIO (*chief information officers*) pemerintah daerah dan secara struktur organisasi setingkat dengan asisten.

Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, lembaga yang mengurus ICT di tingkat pusat dan di kerajaan negeri sudah menggunakan istilah CIO. CIO tidak sekedar istilah, tetapi mempunyai tugas

dan tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan KPDE. Secara teoritis istilah PDE (pengolah data elektronik) digunakan pada awal tahun 80-an, perkembangan teknologi yang cepat, maka peran PDE dan TI sudah berubah juga.

Mengadopsi Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Bil. 1/2000 tentang Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam Malaysia [9], maka secara khusus bidang tugas dan tanggungjawab CIO (*diadaptasi ke CIO kontek Indonesia*), yaitu :

- i. Membuat dan menyediakan perencanaan strategik teknologi informasi yang berisi perancangan penggunaan TI dalam mendukung pencapaian tujuan kantor dinas/instansi di lingkungan pemerintah daerah;
- ii. Memadukan proses lintas fungsional (*cross functional*) antar kantor dinas/instansi untuk menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan mengesankan;
- iii. Mengembangkan, mengendalikan dan memanaj sistem dan infrastruktur TI yang aman berdasarkan *connectivity*, *interoperability* dan *portability*;
- iv. Menentukan arah tujuan sistem aplikasi kantor dinas/instansi agar dapat mengurangi waktu dan biaya pengembangan, pelaksanaan dan operasional;
- v. Perawatan terhadap integritas data elektronik, melakukan kerjasama informasi dan menyediakan metode bagi penyebaran informasi kepada pengguna;
- vi. Menjadi bagian perencanaan dan pembangunan serta bertanggungjawab kepada kepala pemerintah daerah;
- vii. Mempromosikan atau mensosialisasikan *benefit* atas pemanfaatan TI kepada masyarakat untuk mencapai tujuan strategik kantor dinas/instansi;
- viii. Menjadi pemimpin dalam mengembangkan dan melaksanakan proyek TI dengan kantor dinas/instansi.

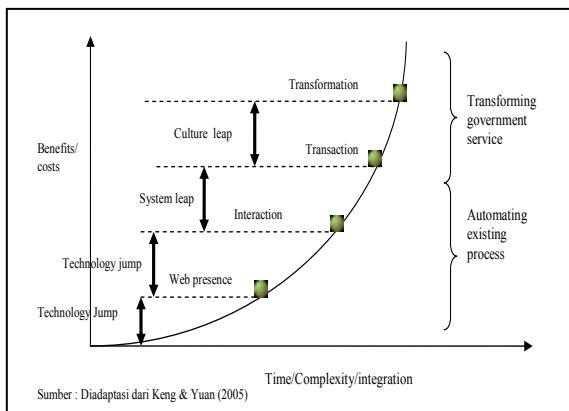
CIO *e-government* selalu bekerjasama dengan kepala pemerintah daerah, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, kepala kantor dinas dan instansi di lingkungan pemerintah daerah guna mewujudkan target *e-government*.

4.2 Reorientasi Model Pentahapan *e-Government*.

Sebagian besar inisiatif *e-government* suatu negara menggunakan pendekatan model pentahapan *e-government* termasuk Indonesia. merujuk Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, Indonesia menggunakan model pentahapan *e-government* empat tahap (dari Gartner Group), yaitu : tahap persiapan (*web presence*), tahap pematangan (*interaction*), tahap pemantapan (*transaction*) dan tahap pemanfaatan (*transformation*).

Semakin tinggi tahapan semakin tinggi kompleksitas, waktu yang diperlukan, integrasi sistem yang

lebih luas, diperlukan biaya yang semakin besar dan diperoleh benefit yang besar pula. Hubungan ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 : Model tahapan *e-government*

Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat, bahwa :

- i. Tahap persiapan adalah tahap pembuatan situs informasi; penyiapan SDM; penyiapan sarana akses, misalnya menyediakan sarana *multipurpose community center*, warnet, *SME center* dll; sosialisasi situs informasi.
- ii. Tahap pematangan merupakan tahap pembuatan situs informasi publik interaktif dan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. Sehingga users dapat melakukan kontak melalui *e-mail* atau mengambil dokumen/formulir dari *website*.
- iii. Tahap pemantapan, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Pengisian aplikasi-aplikasi *online* dapat dilakukan.
- iv. Tahap pemanfaatan atau tahap akhir dengan agenda pembuatan aplikasi pelayanan yang bersifat G_2G , G_2B dan G_2C yang terintegrasi. Pada tahap inilah wujud nyata *e-government* terealisir, proses pelayanan dapat dilakukan lebih efisien, terintegrasi, diseragamkan dan bersifat personal.

Ketika dicermati, model tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pentahapan *e-government*, meliputi :

- i. Mampu memberikan arah tahapan yang jelas bagi pengelola atau penanggungjawab *e-government*;
- ii. Tahap demi tahap dapat dilakukan secara sistematis;
- iii. Dapat difahami oleh setiap orang, terutama bagi fihak yang kurang memahami manajemen sistem dan TI.

Kelemahan yang muncul, adalah :

- i. Dalam pelaksanaannya diasumsikan tidak ada *resistance* dari lingkungan, seperti fihak-fihak yang takut dengan perubahan;

- ii. Pengelola *e-government* hanya berorientasi internal organisasi;
- iii. Dalam implementasinya lebih besar ditekankan kepada orientasi teknologi, bukan sistem;
- iv. Tahap pertama dan kedua, belum ada resiko yang signifikan (karena bersifat internal organisasi). Tetapi ketika pada tahap ketiga dan menuju keempat akan muncul *resistance* yang cukup besar yaitu lompatan sistem dan budaya;
- v. Pada tahap transaksi muncul *resistance* integrasi, seperti : *ego* masing-masing kantor dinas/instansi; saling mempertahankan kepentingan data masing-masing; dan takut dengan perubahan bagi fihak-fihak tertentu.
- vi. Tidak ada tahap analisis lingkungan;
- vii. Tidak nampak tahap penyelarasan visi, misi, dan tujuan pemanfaatan TI dengan visi, misi dan tujuan kantor dinas/instansi pemerintahan daerah.

Perlu difahami bahwa Indonesia dengan negara lain mempunyai banyak perbedaan, seperti : sosial ekonomi, pendidikan, budaya, sistem pemerintahan, politik, sosiologi, luas wilayah dan lainnya.

Kelemahan lain adalah masih terjadi *gap-digital* yang luas di masyarakat, hal ini wajar karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah dewasa saat ini dilahirkan sebelum era internet. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dan menggunakan TI dan internet.

Oleh sebab itu, sepatutnya inisiatif *e-government* di Indonesia tidak terpaku dengan hanya satu model yaitu model pentahapan *e-government* saja. Tetapi perlu *reorientasi* tentang pendekatan lain. Hal ini disebabkan organisasi dalam memanfaatkan ICT diperlukan pendekatan yang berbeda antara organisasi satu dengan yang lain, karena setiap organisasi mempunyai visi, misi, objektif, dan strategik yang berbeda-beda [11].

Oleh yang demikian, perlu ada konsep lain yang mampu memahami realitas sosial organisasi dan masyarakat sebelum membangun *e-government*. Maksud paper ini adalah menawarkan satu konsep penting yaitu perencanaan strategik teknologi informasi yang dihubungkan dengan inisiatif *e-government*. CIO mempunyai peran strategis dalam menyusun perencanaan strategik ini.

Islam menganjurkan, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabranî, “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).*” (HR Thabranî)

4.3 Kegunaan Perencanaan Strategik Teknologi Informasi

Berfikir adalah sulit, berfikir strategik lebih sulit, oleh sebab itu jarang orang mau berfikir secara strategik. Namun, dibalik kesulitan ada kemudahan (lihat QS.94). Beberapa kegunaan dari perencanaan strategik TI, yaitu :

- i. Mampu menciptakan pedoman arah bagi pemerintah daerah, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai inisiatif *e-government* yang diinginkan di masa depan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi masing-masing kantor dinas/instansi pemerintah daerah;
- ii. Menyediakan sebuah kerangka untuk mencapai keunggulan komparatif;
- iii. Mengijinkan semua konstituen pemerintah daerah untuk berpartisipasi dan bekerjasama menuju pencapaian pembangunan inisiatif *e-government*;
- iv. Memungkinkan terjadinya dialog diantara partisipan untuk memperbaiki pemahaman visi, misi, rasa memiliki rancangan strategik dan rasa memiliki inisiatif *e-government*, sehingga mampu meredam *interest conflict*;
- v. Mampu menyalaraskan antar instansi pemerintah daerah dengan lingkungannya;
- vi. CIO dan kantor dinas/instansi dapat melakukan proyek sesuai skala prioritas;
- vii. Mampu mengontrol pengeluaran budget proyek TI;
- viii. Menghindari *ad.hoc project IT*.

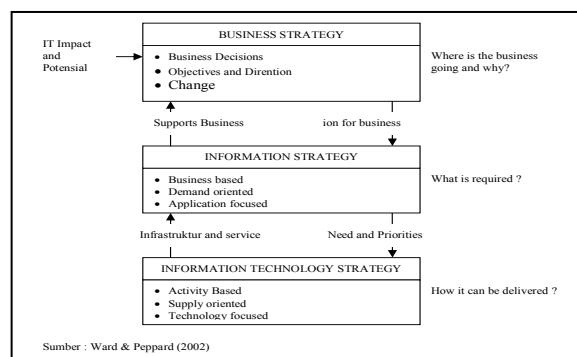
Secara konseptual perencanaan strategik *information, communication and technology* (ICT) adalah suatu proses mensejajarkan ICT dengan tujuan bisnis untuk membuat organisasi lebih efektif (membuat *client* lebih senang dan terpuaskan). Ketika perencanaan ini dilaksanakan akan membawa konsekuensi, yaitu perubahan lingkungan yang mencakup orang, proses, sistem dan informasi. Selain itu ada perubahan rancangan perbaikan kebijakan, prosedur, manajemen SDM, proses bisnis, sistem transaksi, sistem informasi, infrastruktur dan lainnya [11].

Sesungguhnya, secara umum proses perencanaan strategik adalah sama dengan disiplin ilmu manajemen, hanya saja obyek perencanaan strategik adalah sistem dan TI. Tetapi, pertanyaan yang tidak boleh dilupakan oleh CIO sebagai perencana TI, seperti : mengapa menggunakan TI? (maksud); apa yang hendak dicapai dengan TI? (*outcome*); bagaimana dan kapan dapat dicapai? (indikator sukses); apakah yang dikerjakan dengan TI sejajar dengan visi, misi dan tujuan organisasi? (integrasi & dukungan) [4].

Mengadopsi Bryson dan Raja, proses perencanaan strategik (utamanya organisasi *non-profit*), yaitu : (i) memprakarsai dan menyepakati perencanaan

strategik *e-government*; (ii) menentukan penanggungjawab perencanaan (dalam hal ini CIO); (iii) analisis lingkungan (internal, eksternal, kondisi TI saat ini, keperluan sistem dan persepsi keperluan layanan *users*); (iv) menentukan dan menyelaraskan visi, misi dan tujuan TI dengan instansi; (v) merumuskan strategi inisiatif *e-government*; dan (vi) *roadmap* pelaksanaan *e-government* dan perkiraan budget [3; 11].

Disamping itu, CIO perlu memahami pendekatan yang ditawarkan oleh Ward & Peppard [14]. Pendekatan ini terdiri dari tiga strategi, yaitu : strategi bisnis, strategi informasi dan strategi TI. Hubungan antara ketiga strategi, sebagaimana gambar 3.



Gambar 3 : Hubungan strategi bisnis, informasi dan IT.

Dengan demikian, sesungguhnya TI merupakan langkah yang ketiga. Teknologi informasi merupakan sarana pendukung bagi terciptanya sistem informasi instansi yang representatif. Sehingga strategi TI berada pada posisi penawaran (*supply*). Sebelum memutuskan TI, yang terpenting adalah membuat interkoneksi sistem informasi organisasi yang bersepada dengan visi, misi, tujuan dan strategi kantor dinas/instansi. Dilihat dari segi posisi strategi informasi yaitu permintaan (*demand*) terhadap TI.

Dalam kontek ini diharapkan penanggungjawab *e-government* di Indonesia tidak hanya berfokus kepada proyek teknis. Karena TI secanggih apapun tidak akan bermanfaat, jika tidak dihubungkan dengan setiap strategi operasional instansi pemerintah daerah.

Dengan demikian, strategi operasional difahami terlebih dahulu, mengidentifikasi sistem informasi apa saja yang diperlukan, bagaimana proses/mekanisme dan bagaimana model integrasi antar instansi. Baru berfikir keperluan TI yang diperlukan.

5. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

- i. Target utama pembangunan *e-government* adalah terwujudnya *one-stop-services*, ketika hal ini dapat direalisasikan akan banyak memberikan

- benefit* kepada organisasi pemerintah itu sendiri, Staf pemerintah daerah, fihak pembisnis dan semua masyarakat yang selanjutnya akan membawa kepada kemajuan negara;
- ii. Untuk mewujudkan *one-stop-services* tersebut, ternyata menemui pelbagai masalah baik yang bersifat teknis dan metodologis;
 - iii. Secara konsep *e-government* yang dicanangkan oleh pemerintah sudah baik, tetapi secara teknis dan metodologis mengalami kelambahan dan hambatan dalam mencapai target *e-government*;
 - iv. Perlu langkah restrukturisasi KPDE yang merupakan lembaga teknis menjadi CIO *e-government* di pemerintah daerah sebagai lembaga strategis;
 - v. Dan reorientasi model pentahapan *e-government* yang digunakan sebagai pendekatan selama ini dengan pendekatan lain yang dilandaskan kepada pemahaman sosio organisasi dan masyarakat Indonesia;
 - vi. Pendekatan dimaksud adalah perencanaan strategik teknologi informasi. Langkah ini sangat penting dilakukan oleh CIO, karena mampu mengenali dan memahami lingkungan internal dan eksternal sebelum membangun *e-government*. Sehingga setiap pemerintah daerah satu dengan yang lain mempunyai langkah dan strategi yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu *target e-government*.

6. Referensi

- [1] Alfred, Tat-Kei Ho. 2002. Reinventing local government and the e-government initiative. *The Premier Journal of Public Administration Review (PAR)*. July-August. 62(4): 434-444.
- [2] Berryman, Jennifer. 2004. *E-government: issues and implications for public libraries*. Manuscript. July 2004. http://www.alia.org.au/publishing/alj/_53.4/full.text/_berryman.html [10 April 2006].
- [3] Bryson, M., John. 2005. *Strategic planning for public and nonprofit organizations (bagi organisasi sosial)*. Terj. Miftahuddin, M. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Cavalier, C., Jamie. 2002. The forgotten question in information technology strategy planning. *Journal Planning for Higher Education*. September-November 31(1): 4-14.
- [5] Gupta, M.P. & Kumar, Prabhat. 2006. e-governance impacts Gujarat :: Corruption reduced, tax revenues increase at interstate border checkposts. <http://www.egovonline.net/articles/article-details.asp> [12-04-2006].
- [6] Indonesia. 2003. *Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government*. Instruksi Presiden Republik Indonesia. No.3/2003.
- [7] Indrajit, Eko, Richardus. et al. 2005. *E-government in action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [8] Keng, Siau & Yuan, Long. 2005. Synthesizing e-government stage models – a meta-synthesis based on meta-ethnography approach. *Journal Industrial Management & Data Systems*. 105(4): 443-458.
- [9] Mampu. 2000. Penamaan ketua pegawai maklumat sektor awam. *Pekeliling Ketua Setiausaha Negara No.PM(S) 13114 Jld.13(74): 22 Mac 2000*. <http://www.mampu.gov.my> [11 November 2006].
- [10] Office of Management and Budget. 2002. *E-government strategy (simplified delivery of services to citizens)*. February 27, 2002 http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg/egovs_trategy.pdf [07 April 2006].
- [11] Raja, Malik Mohamed. 2003. *Practical approach to ICT strategic planning*. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).
- [12] Schwae, R. & Deane, A. 2003. Deploying e-government programs: the strategic importance of I before e. *Journal Info*. 5(4):10-19.
- [13] United Nation. 2005. *UN Global E-government Readiness Report 2005 (from e-government to e-inclusion)*. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan_021888.pdf [12-04-2006].
- [14] Ward, John & Peppard, Joe. 2002. *Strategic planning for information systems*. Ed. ke-3. England: John Wiley & Sons, Ltd.
- [15] World Bank. 2002. *The e-government handbook for developing countries*. A project of infodev and the center for democracy and technology. http://www.infodev.org/files/841_file_eGovern ment_Handbook.pdf [12-04-2006].